



JRAK

Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis (e-journal)

p-ISSN: 2407-828X e-ISSN: 2407-8298

Vol. 11, No. 2, Juli 2025

<https://jurnal.plb.ac.id/index.php/JRAK/index>

MODEL OPTIMALISASI PAJAK SUMBER DAYA ALAM DI BERBAGAI NEGARA BERKEMBANG: *SYSTEMATIC LITERATURE REVIEW*

Tri Frida Suryati

Universitas Muhammadiyah Mamuju

Email: suryatitrifrida@gmail.com

ABSTRACT

Developing countries are endowed with abundant natural resources; however, this wealth is often not reflected in national revenue due to weak taxation system. Natural resource taxation is expected to contribute significantly to fiscal sustainability while ensuring fair and efficient resource exploitation. Nonetheless, challenges such as weak regulation, low tax compliance, limited administrative capacity, and information asymmetry hinder revenue optimization. This study conducts a Systematic Literature Review (SLR) guided by the PRISMA methodology to synthesize findings from 20 selected articles. It identifies gaps and recurring patterns in previous research and formulates a conceptual model for natural resources tax optimization in developing contexts. The model integrates economic, institutional, and governance dimensions while emphasizing evidence-based policy making. The findings offer both theoretical contributions to public sector accounting and practical insights for policymakers in designing sustainable and equitable fiscal policies for resources-rich developing countries.

Keywords: tax optimization; developing countries; systematic literature review.

Pendahuluan

Negara berkembang tidak bisa didefinisikan secara universal, namun, indikator kemampuan menyediakan kebutuhan dasar bagi masyarakat sekaligus kemampuan berpartisipasi secara kolektif dalam ekonomi global hanya bisa dipenuhi oleh dua pertiga Negara di dunia. Berdasarkan indikator kemampuan tersebut tercipta perbedaan antara Negara maju dengan Negara berkembang sehingga urutan Negara-negara berpendapatan *riil* tertinggi ke

Negara-negara berpendapatan *riil* rendah telah menciptakan batasan-batasan antara Negara maju dan Negara berkembang (Guttermann, A.S. 2022). Bank Dunia mengklasifikasikan Negara-negara berdasarkan tingkat pendapatannya, yaitu (1) Negara berpendapatan tinggi, (2) Negara berpendapatan menengah-atas, (3) Negara berpendapatan menengah-bawah dan (4) Negara berpendapatan rendah. Keempat klasifikasi pendapatan Negara-negara di dunia sejak tahun 1995-2020

telah dikelompokkan melalui penelitian Ahmad & Sofia (2023) berdasarkan *Sustainable Development Indeks/SDI*, *Economic Sustainability Indeks/ESI*, *Social Sustainability Indeks/SSI*, dan *Environmental Sustainability Indeks/NSI*. Diketahui bahwa dari 140 Negara di Dunia ini, Indonesia merupakan Negara yang memiliki SDI 0,59 atau peringkat ke 53, ESI 0,37 atau peringkat ke 68, SSI 0,65 atau peringkat ke 82 dan NSI 0,74 atau peringkat ke 15. (Ahmad & Sofia; 2023). Berdasarkan hal tersebut, diketahui bahwa Indonesia memiliki Indeks Pembangunan Berkelanjutan yang rendah, Indeks Ketahanan Ekonomi Indonesia juga rendah sehingga dianggap belum mampu memiliki ketahanan ekonomi, serta Indeks Keberlanjutan Sosial yang rendah sehingga belum mampu mempertahankan kesejahteraan sosial masyarakat dibawah rata-rata negara berpendapatan tinggi. Namun, Indeks Keberlanjutan Lingkungan di Indonesia sangat tinggi

Negara berkembang seperti Indonesia memiliki kekayaan sumber daya alam melimpah seperti minyak, gas dan mineral. Instrumen penting atas pengelolaan sumber daya alam yang berkeadilan adalah melalui sistem perpajakan yang adil, transparan dan efisien (A.K. Putri & Taun, 2023).

Sistem perpajakan atas pemanfaatan sumber daya alam, masih lemah karena rendahnya kepatuhan pajak, dan adanya asimetri informasi antara pemerintah dan perusahaan pengelolaan sumber daya sehingga menghambat optimalisasi penerimaan pajak. Struktur ekonomi masyarakat Indonesia juga masih bergantung pada ekspor komoditas primer sehingga rentan terhadap fluktuasi harga pasar global. Pajak atas sumber daya alam diharapkan memberikan kontribusi yang optimal terhadap pendapatan Negara serta

menjaga keberlanjutan eksploitasi sumber daya tersebut.

Indonesia belum memiliki suatu model optimalisasi perpajakan sumber daya alam yang mampu menjawab berbagai tantangan tersebut dengan tetap mempertimbangkan kondisi sosial, ekonomi, dan kelembagaan yang berlaku di Negara berkembang (Syam, 2024).

Indonesia harus memiliki desain pajak yang mampu menangkap rente ekonomi secara efisien tanpa menghambat investasi (Mahi, 2019). Putri & Andi (2020) membandingkan efektivitas berbagai skema pajak seperti royalti tetap, royalti ad valorem, dan pajak penghasilan berbasis laba, serta menyarankan fleksibilitas dalam penerapan kebijakan fiskal terhadap sumber daya alam. (Sari et al., 2023) menyajikan pendekatan kelembagaan dalam reformasi perpajakan sektor ekstraktif, menekankan bahwa keberhasilan kebijakan tidak hanya bergantung pada desain teknis pajak tetapi juga pada kapasitas kelembagaan dan integritas otoritas pajak. Di sisi lain, hubungan antara tata kelola yang buruk dengan rendahnya penerimaan pajak dari sumber daya alam dan meningkatnya konflik sumber daya di Negara-Negara berkembang (Dalimunthe et al., 2023).

Tahun 2024, Indonesia telah menetapkan kebijakan atas pemanfaatan sumber daya alam yang memiliki dampak khusus diantaranya kebijakan sistem tarif berjenjang dan larangan ekspor bahan baku mineral yang telah berhasil meningkatkan pendapatan Negara, nilai ekspor mineral olahan lebih tinggi dan pengurangan ekspor bahan baku (Setyagama et al, 2024), kebijakan dana perminyakan dan gas alam yang telah meningkatkan pendapatan Negara, pengurangan impor bahan bakar, dan telah berpotensi untuk menghalangi investasi asing (Wirayaja et al., 2024) dan kebijakan atas hilirisasi dan

kebijakan perpajakan nikel yang berdampak pada nilai tambah produk nikel yang lebih tinggi, peningkatan pendapatan Negara dari royalty dan biaya (Ashar et al., 2024).

Di tengah dinamika tersebut, diskusi tentang optimalisasi pajak sumber daya alam telah berkembang ke arah penciptaan model fiskal progresif yang disesuaikan dengan siklus komoditas, sistem bagi hasil yang adil, serta transparansi fiskal melalui pelibatan publik dan pelaporan berkala. Namun, kajian-kajian tersebut umumnya dilakukan secara terpisah-pisah dan belum memberikan suatu kerangka komprehensif yang dapat dijadikan rujukan untuk pengambilan kebijakan berbasis bukti (*evidence-based policy making*). Selain itu, pendekatan yang dominan digunakan masih bersifat konseptual atau berbasis studi kasus dengan generalisasi yang terbatas. Belum ada satu studi pun yang secara sistematis menyintesis temuan-temuan tersebut ke dalam satu model konseptual yang dapat diterapkan di Negara berkembang.

Ketidakterpaduan hasil riset ini menimbulkan celah (*gap*) dalam pemanfaatan pengetahuan akademik untuk tujuan formulasi kebijakan yang lebih strategis dan responsif. Oleh karena itu, pendekatan *systematic literature review* (SLR) menjadi penting untuk dilakukan agar dapat menyusun peta pengetahuan (*knowledge mapping*), mengidentifikasi tren, kontradiksi, serta celah-celah penelitian yang belum banyak digali. Pendekatan SLR juga memungkinkan para peneliti dan pembuat kebijakan untuk melihat pola yang berulang dalam literatur dan membangun kerangka konseptual baru berdasarkan sintesis bukti-bukti empiris yang tersedia.

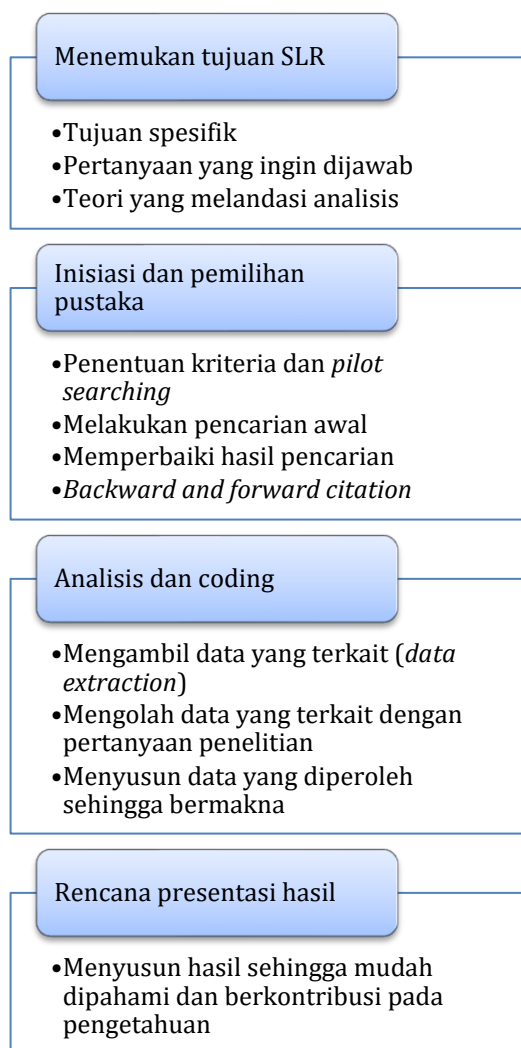
Kebaruan ilmiah (*novelty*) dalam artikel ini terletak pada upaya sistematis untuk

merumuskan model optimalisasi pajak sumber daya alam yang kontekstual dengan Negara berkembang melalui sintesis literatur yang telah terpublikasi secara akademik. Dengan menyaring dan menganalisis literatur dari berbagai sumber terindeks, artikel ini berupaya menggabungkan berbagai pendekatan — baik ekonomi, kelembagaan, maupun kebijakan publik — dalam satu kerangka integratif. Model yang dihasilkan tidak hanya berfokus pada desain teknis pajak semata, tetapi juga memperhatikan dimensi *governance*, struktur kelembagaan, serta keterlibatan masyarakat dalam pengawasan fiskal. Dengan demikian, hasil kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis bagi pengembangan ilmu akuntansi sektor publik serta implikasi praktis bagi pembuat kebijakan fiskal di Negara berkembang. Tujuan dari artikel ini adalah untuk melakukan *systematic literature review* terhadap penelitian-penelitian yang membahas model optimalisasi pajak sumber daya alam, terutama yang relevan dengan konteks Negara berkembang. Kajian ini bertujuan untuk: (1) mengidentifikasi pendekatan-pendekatan perpajakan sumber daya alam yang telah diteliti secara akademik; (2) menganalisis kelebihan, kekurangan, dan kesesuaian masing-masing pendekatan terhadap kondisi Negara berkembang; serta (3) merumuskan suatu model konseptual yang dapat menjadi landasan dalam pengembangan kebijakan pajak sumber daya alam yang lebih efektif, adil, dan berkelanjutan.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan *Systematic Literature Review* (SLR) yang bertujuan untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan menginterpretasikan secara sistematis berbagai penelitian yang

relevan terkait model optimalisasi pajak sumber daya alam di Negara berkembang. Telaah literatur ini dilakukan dengan mengikuti panduan metode PRISMA (*Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses*), yang menyediakan langkah-langkah terstruktur dalam proses identifikasi, seleksi, dan analisis artikel ilmiah sehingga hasil kajian dapat dipertanggungjawabkan. Berikut merupakan gambaran tahapan SLR dalam penelitian ini yang disajikan pada Gambar 1.



Gambar 1. Langkah-Langkah SLR
Sumber: Priharsari (2022)

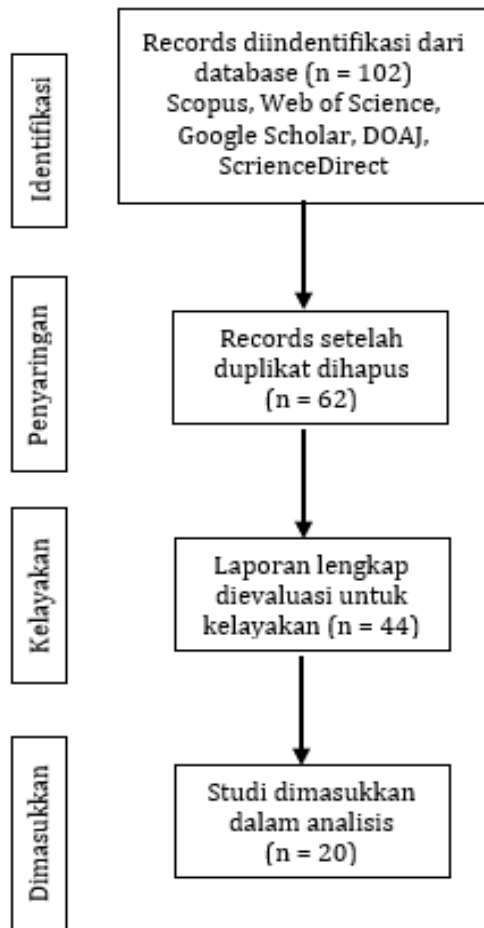
Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari artikel-artikel ilmiah yang

dipublikasikan dalam jurnal nasional maupun internasional yang memiliki relevansi dengan topik kajian. Artikel yang digunakan bersumber dari berbagai *database* terpercaya, seperti Scopus, Web of Science, Google Scholar, DOAJ, dan ScienceDirect, baik yang bersifat *open access* maupun tertutup, selama memenuhi kriteria seleksi yang ditetapkan. Untuk memastikan kualitas dan relevansi literatur yang dianalisis, digunakan kriteria inklusi dan eksklusi. Adapun kriteria inklusi meliputi: artikel yang ditulis dalam bahasa Inggris atau Indonesia, membahas topik pajak sumber daya alam seperti mineral, migas, dan hasil hutan di Negara berkembang, berfokus pada model, strategi, atau kebijakan optimalisasi pajak, serta telah melalui proses *peer review*. Sementara itu, kriteria eksklusi meliputi artikel yang tidak tersedia dalam bentuk *full-text*, artikel yang bersifat opini atau editorial tanpa kajian ilmiah mendalam, dan studi kasus yang terbatas pada satu perusahaan tanpa relevansi yang lebih luas terhadap kebijakan fiskal nasional.

Hasil dan Pembahasan

Telaah literatur ini dilakukan dengan mengikuti panduan metode PRISMA (*Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses*), menghasilkan temuan sebanyak 44 referensi yang judulnya sesuai dengan kata kunci dalam query. Dari jumlah tersebut, 3 artikel berbahasa Spanyol dikeluarkan karena tidak sesuai dengan bahasa yang digunakan dalam penelitian ini. Selain itu, ditemukan 10 duplikasi data dan 6 artikel tidak termasuk dalam kategori Tier Scopus Q1 hingga Q4, sehingga juga dieliminasi. Terdapat pula 3 artikel lain yang tidak memenuhi syarat sebagai artikel jurnal ilmiah. Setelah proses seleksi tersebut, tersisa 20 artikel yang memenuhi kriteria dan

termasuk dalam Tier Scopus Q1, Q2, Q3, dan Q4 untuk dianalisis lebih lanjut dalam penelitian ini. Berikut SLR dengan Metode PRISMA pada penelitian ini seperti terlihat pada Gambar 2.



Gambar 2. SLR dengan Metode PRISMA
Sumber: Data diolah peneliti (2025)

Penelitian terkait model optimalisasi pajak sumber daya alam di Negara berkembang telah menjadi perhatian penting dalam literatur perpajakan internasional. Salah satu kontribusi penting datang dari Yabré et al. (2025) yang menyoroti peran aktor politik dalam mobilisasi penerimaan pajak di Negara berkembang. Mereka menunjukkan bahwa keberadaan banyak aktor politik (*veto players*) dapat memperkuat akuntabilitas fiskal dan

mendorong kebijakan pajak yang lebih optimal.

Studi (Raoul, 2020) menggarisbawahi pentingnya efisiensi teknis dalam pelayanan pertanahan sebagai basis penting untuk memperluas basis pajak, yang berkontribusi pada optimalisasi penerimaan pajak sumber daya alam. Sementara itu, (Cockfield, 2007) mengkritik pendekatan puristik dalam hukum pajak internasional yang dianggap tidak sesuai untuk konteks Negara berkembang, serta menekankan perlunya pendekatan kontekstual untuk mendesain sistem perpajakan yang lebih relevan.

(Gnangnon, 2022) membahas ketidakstabilan penerimaan pajak dan menunjukkan bagaimana volatilitas pajak dapat menjadi hambatan dalam membangun sistem pajak yang kuat. Hal ini menjadi semakin penting dalam konteks Negara berkembang yang sangat bergantung pada sumber daya alam. Selanjutnya, (Mardan & Stimmelmayr, 2020) mengkaji kompetisi pajak antar Negara dan menemukan perbedaan dinamika antara Negara maju dan berkembang, yang turut memengaruhi strategi optimalisasi pajak.

(Apeti & Edoh, 2023) meneliti pengaruh teknologi keuangan seperti *mobile money* dalam meningkatkan penerimaan pajak di Negara berkembang, mengindikasikan potensi digitalisasi dalam memperkuat sistem pajak sumber daya alam. Dalam perspektif yang lebih luas, (Auriol & Warlters, 2005) menyajikan analisis komprehensif mengenai basis perpajakan dan kendala yang dihadapi Negara berkembang dalam mengelola sumber daya pajak mereka.

Penelitian (Halim & Rahman, 2022) menunjukkan bahwa reformasi pajak memiliki implikasi besar terhadap pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs), termasuk dalam

hal pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan. Sementara itu, (Chen, 2024) menyoroti pengaruh pajak minimum global dan kompetisi pajak asimetris terhadap insentif investasi, yang juga relevan dalam konteks optimalisasi pajak SDA di Negara berkembang.

(Zheng et al., 2020) melalui pendekatan AI *Economist* menawarkan pandangan baru tentang kebijakan pajak berbasis kecerdasan buatan yang bisa memperkuat produktivitas dan kesetaraan. Di Indonesia, (Alexander & Yuristine, 2024) memberikan studi kasus tentang dinamika pajak pertanian yang merefleksikan tantangan dan peluang perpajakan sektor SDA di Negara agraris.

(Gordon & Li, 2009) menemukan teka-teki struktur pajak di Negara berkembang dan mencoba memberikan penjelasan mengenai inefisiensi serta kelemahan administratif yang memengaruhi kinerja pajak. Sebaliknya, (Sujarwati, 2020) dan (De Mooij & Ederveen, 2003) menyoroti pengaruh tarif pajak perusahaan terhadap investasi asing langsung (FDI), yang penting karena sektor SDA sering kali melibatkan investor asing.

(Gasior et al., 2022) mengevaluasi dampak distribusi dari sistem pajak dan tunjangan di Afrika, memberikan pemahaman tentang dampak sosial dari kebijakan pajak yang dapat dimanfaatkan untuk merancang sistem pajak SDA yang adil dan inklusif. Dalam konteks ekstraksi sumber daya, (Pemy, 2016) memperkenalkan pendekatan permainan diferensial dalam ekstraksi dan perpajakan sumber daya strategis.

Penelitian (Wang et al., 2024) menjelaskan strategi insentif pajak dalam pengelolaan sumber daya publik yang mencerminkan pentingnya keseimbangan antara penghargaan dan hukuman dalam sistem perpajakan.

Selain itu, (Fernández-Rodríguez et al., 2021) mengidentifikasi faktor institusional dan bisnis yang memengaruhi tarif pajak efektif di ekonomi berkembang, memberikan wawasan dalam merancang kebijakan pajak yang adaptif.

(Martorano, 2018) menganalisis hubungan antara pajak dan ketimpangan di Amerika Latin, menekankan pentingnya keadilan distribusi dalam optimalisasi kebijakan fiskal. Terakhir, (Reinsberg et al., 2020) mengkaji peran IMF dalam membentuk struktur pajak Negara berkembang, dan menyimpulkan bahwa fokus IMF lebih banyak pada pajak tidak langsung daripada pajak dari kekayaan sumber daya alam, yang bisa menjadi kendala dalam optimalisasi pajak SDA.

Literatur yang dibahas menunjukkan pentingnya reformasi struktural, digitalisasi, dan pendekatan kebijakan kontekstual untuk mengoptimalkan pajak sumber daya alam di Negara berkembang. Pendekatan sistematis terhadap perancangan kebijakan, penguatan kapasitas institusi, dan dukungan teknologi modern merupakan kunci dalam membangun sistem perpajakan yang adil, efektif, dan berkelanjutan.

Hasil pencarian jurnal dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Hasil Pencarian Jurnal

No	Authors & Journal	Title	Citation	R
1	Yabré, T., Loaba, S., & Semedo, G. (2025); International Journal of Public Administ	Tax Revenue Mobilization in Developing Countries: Do We Need More Political Veto Players?	1-21	Q4
2	Raoul, M. K. (2020); International Journal of Public Administ	Analysis of the technical efficiency of the programme of modernisation of the land tenure services in a developing country	43 (15), 1304–1316	Q3
3	Cockfield, A. (2007); eJTR	Purism and Contextualism within International Tax Law Analysis: How Traditional Analysis Fails	5, 199	Q4

Model Optimalisasi Pajak Sumber Daya Alam Di Berbagai Negara Berkembang: Systematic Literature Review

		Developing Countries		
4	Gnangnon, S. K. (2022); Applied Economic Analysis	Tax revenue instability and tax revenue in developed and developing countries	30 (88), 18–37	Q4
5	Mardan, M., & Stimmelmayer, M. (2020); Journal of Development Economics	Tax competition between developed, emerging, and developing countries–Same same but different?	146, 102491	Q1
6	Apeti, A. E., & Edoh, E. D. (2023);	Tax revenue and mobile money in developing countries	161, 103014	Q1
7	Auriol, E., & Warlters, M. (2005)	Taxation base in developing countries	89 (4), 625–646	Q1
8	Halim, M. A., & Rahman, M. M. (2022); Heliyon	The effect of taxation on sustainable development goals: evidence from emerging countries	8 (9)	Q2
9	Chen, X. (2024); arXiv preprint	The Global Minimum Tax, Investment Incentives and Asymmetric Tax Competition	arXiv:2409.05397	Q3
10	Zheng, S., et al. (2020); arXiv preprint	The AI Economist: Improving equality and productivity with AI-driven tax policies	arXiv:2004.13332	Q4
11	Alexander, R. F., & Yuristine, T. L. B. (2024); Asian Journal of Social and Humanities	The Complex Dynamics of Agricultural Taxation in Developing Countries- Insights from Indonesia	2 (6), 1294–1304	Q2
12	Gordon, R., & Li, W. (2009); Journal of Public Economics	Tax structures in developing countries: Many puzzles and a possible explanation	93 (7–8), 855–866	Q1
13	Sujarwati, A. I. (2020); Economics and Finance in Indonesia	Corporate income tax rate and foreign direct investment: A Cross-country empirical study	66 (1), 3	Q3
14	De Mooij, R. A., & Ederveen, S. (2003); International Tax and Public Finance	Taxation and foreign direct investment: a synthesis of empirical research	10, 673–693	Q2
15	Gasior, K., et al. (2022); International Journal of Sociology and Social Policy	The distributional impact of tax and benefit systems in five African countries	42 (1/2), 92–105	Q2
16	Pemy, M. (2016); arXiv preprint	Optimal extraction and taxation of strategic natural resources: A differential game approach	arXiv:1611.02547	Q4
17	Wang, L., et al. (2024);	The paradigm of tax-reward and	291 (2024), 20240182	Q1

	Proceedings of the Royal Society B	tax-punishment strategies in public resource management		
18	Fernández-Rodríguez, E., et al. (2021); Economic Modelling	Business and institutional determinants of Effective Tax Rate in emerging economies	94, 692–702	Q1
19	Martorano, B. (2018); Journal of International Development	Taxation and inequality in developing countries: Lessons from Latin America	30(2), 256–273	Q2
20	Reinsberg, B., et al. (2020); Studies in Comparative International Development	Taxing the people, not trade: the IMF and taxation in developing countries	55(3), 278–304	Q1

Sumber: Data diolah peneliti (2025)

Kesimpulan

Penelitian terkait model optimalisasi pajak sumber daya alam di Negara berkembang secara keseluruhan menegaskan pentingnya reformasi struktural, pendekatan kontekstual, dan pemanfaatan teknologi modern dalam membangun sistem perpajakan yang adil, efektif, dan berkelanjutan. Literatur yang dibahas mengungkap peran signifikan aktor politik (Yabré et al., 2025), efisiensi teknis administrasi lahan (Raoul, 2020), dan pentingnya desain hukum pajak yang kontekstual (Cockfield, 2007) dalam memperkuat penerimaan pajak SDA. Ketidakstabilan pendapatan pajak (Gnangnon, 2022), kompetisi pajak global (Mardan & Stimmelmayer, 2020), serta dampak teknologi keuangan (Apeti & Edoh, 2023) memperkuat urgensi adopsi sistem pajak yang adaptif. Studi lainnya menekankan pentingnya basis pajak yang luas (Auriol & Warlters, 2005), keterkaitan pajak dengan SDGs (Halim & Rahman, 2022), kebijakan pajak berbasis AI (Zheng et al., 2020), dan dinamika lokal seperti pajak pertanian di Indonesia (Alexander & Yuristine, 2024). Selain itu, struktur tarif pajak dan FDI (Sujarwati, 2020; De Mooij & Ederveen, 2003), distribusi pajak yang adil (Gasior et al., 2022), serta mekanisme insentif dan hukuman (Wang et al., 2024) turut menjadi elemen

penting dalam optimalisasi pajak SDA. Dengan mengintegrasikan faktor politik, institusional, teknologi, dan sosial, Negara berkembang dapat merancang sistem perpajakan yang lebih responsif terhadap tantangan domestik dan global, serta mampu menjamin keadilan fiskal dan keberlanjutan pengelolaan sumber daya alam.

DAFTAR PUSTAKA

- Alexander, R. F., & Yuristine, T. L. B. (2024). The Complex Dynamics of Agricultural Taxation in Developing Countries-Insights from Indonesia. *Asian Journal of Social and Humanities*, 2(6), 1294–1304.
- Ahmad. A & Sofia. A (2023). A Composite Indeks for Sustainable Development: Measurement and Development Status of Selected Countries. *Journal of Economic Impact*, 5(1), 1-14. <https://doi.org/10.52223/jei5012301>.
- Anggoro, D. D., Indriani, & Hikmat, A. A. (2023). *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Kebijakan Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah* (pertama). Universitas Brawijaya Press UB Press.
- Apeti, A. E., & Edoh, E. D. (2023). Tax revenue and mobile money in developing countries. *Journal of Development Economics*, 161, 103014.
- Auriol, E., & Warlters, M. (2005). Taxation base in developing countries. *Journal of Public Economics*, 89(4), 625–646.
- Chen, X. (2024). *The Global Minimum Tax, Investment Incentives and Asymmetric Tax Competition*.
- Cockfield, A. (2007). Purism and Contextualism within International Tax Law Analysis: How Traditional Analysis Fails Developing Countries. *EJTR*, 5, 199.
- Dalimunthe, M. I., Tampubolon, K., & Elazhari. (2023). Evaluation of Online Tax Systems: Good Governance Perspective. *All Fields of Science J-LAS*, 3(4), 166–172. <https://j-las.lemkomindo.org/index.php/AFoSJ-LAS/index>
- De Mooij, R. A., & Ederveen, S. (2003). Taxation and foreign direct investment: a synthesis of empirical research. *International Tax and Public Finance*, 10, 673–693.
- Fernández-Rodríguez, E., García-Fernández, R., & Martínez-Arias, A. (2021). Business and institutional determinants of Effective Tax Rate in emerging economies. *Economic Modelling*, 94, 692–702.
- Gasior, K., Leventi, C., Noble, M., Wright, G., & Barnes, H. (2022). The distributional impact of tax and benefit systems in five African countries. *International Journal of Sociology and Social Policy*, 42(1/2), 92–105.
- Gnangnon, S. K. (2022). Tax revenue instability and tax revenue in developed and developing countries. *Applied Economic Analysis*, 30(88), 18–37.
- Gordon, R., & Li, W. (2009). Tax structures in developing countries: Many puzzles and a possible explanation. *Journal of Public Economics*, 93(7–8), 855–866.
- Gutterman, A. S. (2022). Entrepreneurship in Developing Countries. Social Science Research Network. <https://doi.org/10.2139/ssrn.4235629>.
- Halim, M. A., & Rahman, M. M. (2022).

- The effect of taxation on sustainable development goals: evidence from emerging countries. *Heliyon*, 8(9).
- Hapsari, I., Program, S., S1, A., Ekonomi, F., Bisnis, D., Hayam, U., & Perbanas, W. (2021). Penghindaran Pajak Perusahaan Publik Di Indonesia. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 9(2), 397–406.
<https://doi.org/10.17509/jrak.v9i2.29934>
- Harahap, T., & Ritonga, R. A. (2024). Peran Good Corporate Governance dalam Meningkatkan Transparansi Laporan Keuangan. *JISOSEPOL: Jurnal Ilmu Sosial Ekonomi Dan Politik*, 2(2), 353–360.
<https://doi.org/10.61787/56ny9959>
- Mahi, B. R. (2019). *Kebijakan Perpajakan: Optimalisasi Insentif dan Kesenambungan Fiskal*. Gramedia Pustaka Utama.
- Mardan, M., & Stimmelmayer, M. (2020). Tax competition between developed, emerging, and developing countries—Same same but different? *Journal of Development Economics*, 146, 102491.
- Martorano, B. (2018). Taxation and inequality in developing countries: Lessons from the recent experience of Latin America. *Journal of International Development*, 30(2), 256–273.
- Pemy, M. (2016). Optimal extraction and taxation of strategic natural resources: A differential game approach. *ArXiv Preprint ArXiv:1611.02547*.
- Putri, A. K., & Taun, T. (2023). Peranan Hukum Pajak Dalam Pembangunan Ekonomi Nasional Guna Mencapai Tujuan Negara. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(1), 198–209.
- Putri, W. E., & Andi. (2020). Perpajakan, Pemahaman Peraturan Dan, Transparansi Terhadap, Akuntabilitas. *IJAB: Indonesian Journal of Accounting and Business*, 1, 80–92.
<https://doi.org/10.33019/ijab.v1i2.18>
- Raoul, M. K. (2020). Analysis of the technical efficiency of the programme of modernisation of the land tenure services in a developing country. *International Journal of Public Administration*, 43(15), 1304–1316.
- Reinsberg, B., Stubbs, T., & Kentikelenis, A. (2020). Taxing the people, not trade: the international monetary fund and the structure of taxation in developing countries. *Studies in Comparative International Development*, 55(3), 278–304.
- Sari, I. P., Trisnawati, E., & Firmansyah, A. (2023). Pengungkapan Tata Kelola Perusahaan, Kompetensi Auditor Internal, Manajemen Laba: Peran Moderasi Penghindaran Pajak. *Jurnal Informasi, Perpajakan, Akuntansi, Dan Keuangan Publik*, 18(1), 87–110.
<https://doi.org/10.25105/jipak.v18i1.15808>
- Sujarwati, A. I. (2020). Corporate income tax rate and foreign direct investment: A Cross-country empirical study. *Economics and Finance in Indonesia*, 66(1), 3.
- Syam, A. B. (2024). OPTIMALISASI PENDAPATAN ASLI DAERAH MELALUI PAJAK DAN RETRIBUSI. *Jurnal Ilmiah Administrasita*, 15(1), 74–82.
- Wang, L., Liu, Y., Guo, R., Zhang, L., Liu, L., & Hua, S. (2024). The

- paradigm of tax-reward and tax-punishment strategies in the advancement of public resource management dynamics. *Proceedings of the Royal Society B*, 291, 20240182.
- Yabré, T., Loaba, S., & Semedo, G. (2025). Tax Revenue Mobilization in Developing Countries: Do We Need More Political Veto Players? *International Journal of Public Administration*, 1–21.
- Zheng, S., Trott, A., Srinivasa, S., Naik, N., Gruesbeck, M., Parkes, D. C., & Socher, R. (2020). The ai economist: Improving equality and productivity with ai-driven tax policies. *ArXiv Preprint ArXiv:2004.13332*.

Copyright holder:

Tri Frida Suryati (2025)

First publication right:

JRAK: Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis (e-journal)

This article is licensed under:

